

# STRUKTURALISME KONFLIK : PEMAHAMAN AKAN KONFLIK PADA MASYARAKAT INDUSTRI MENURUT LEWIS COSER DAN RALF DAHRENDORF

Argyo Demartoto  
Sosiologi  
FISIP Universitas Sebelas Maret

## **Abstract**

*The effect of industrialization process cannot be apart from the presence of the problems tending to lead to the social jealousy, both materialistic ini nature and due to the presence of the inharmonious relationship or interaction between the elements within industrial society in the form of social distortion or called conflict within industrial society. The conflict approach proposed by Coser as conflict functionalism means that in the presence of conflict, consensus, integration and dissension is an intact unity in undertaking a fundamental process, despite different content of each portion of each correlated social system. The conflict theory proposed by Ralf Dahrendorf is the struggle of class existing in industrial society, not emphasizing on the thinking of production infrastructures but power holding, encompassing the legitimate right to dominate others.*

**Key words:** industrial society, conflict, functionalism, the struggle of class existing.

## **A. Pengantar**

Masyarakat yang ada di kawasan industri terdiri dari beberapa unsur elemen sosial yang terbentuk karena adanya perkembangan sebuah proses industrialisasi. Permasalahan yang muncul di dalam lingkungan masyarakat industri antara lain: hubungan atau interaksi antara atasan-pekerja buruh-masyarakat sekitar pabrik, adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan kehadiran bangunan-bangunan pabrik yang berada disekitar masyarakat baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi hingga pengaruh perkembangan yang mengarah pada pemahaman atas sifat yang materialistik.

Imbas dari adanya proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan yang cenderung mengarah

pada kecemburuan-kecemburuan sosial, baik yang bersifat materialistik maupun yang diakibatkan dari adanya hubungan atau interaksi yang tidak harmonis dari setiap unsur elemen yang ada di masyarakat industri dalam bentuk distorsi-distorsi sosial yang mana menurut penulis hal itu dinamakan sebagai konflik dalam masyarakat industri.

## **B. Mempertahankan Struktur Melalui Konflik: Lewis Coser**

Penekanan teori konflik ini adalah bahwa tingkat struktur sosial yang berada di masyarakat, dimana susunan struktur yang tercipta merupakan suatu hasil persetujuan dan konsensus yang sekaligus mengarah pada proses konflik sosial (Poloma, 1994:

106 – 107). Pemahaman akan konflik menurut Coser merupakan suatu kesadaran yang mencerminkan semangat pembaharuan di dalam masyarakat yang mana nantinya mungkin akan dapat dijadikan sebagai suatu alat yang sifatnya instrumental di dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan atas struktur sosial yang ada. Selain itu konflik juga dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau beberapa kelompok yang akhirnya dengan adanya konflik inipun akan membuat kelompok yang lain untuk memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial di sekelilingnya.

Seluruh fungsi positif konflik (keuntungan dari situasi konflik yang memperkuat struktur) dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan *out group*. Di dunia internasional kita dapat melihat bagaimana konflik dalam bentuk tindakan militer atau di meja perundingan, mampu menetapkan akan batas-batas geografis nasional. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, kita dapat melihat dengan adanya konflik pada saat penggulingan rejim Orde Baru, misalnya dimana dengan kehadiran konflik yang merupakan penjabarannya dalam bentuk chaos secara sengaja digulirkan dengan mengatasnamakan suku, agama, ras dan golongan. Konflik yang tercipta memiliki muatan kepentingan yang sekaligus merupakan suatu kesepakatan pemegang kekuasaan untuk menciptakan kerusuhan-kerusuhan, kondisi *violence* dalam bentuk penjarahan, pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan. Hal ini hanya semata-mata dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh Soeharto.

Konflik yang sedang berlangsung dengan *out-group* dapat pula memperkuat identitas para anggota kelompok. Perang bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas *in-group* negara Arab dan Israel, atau kaum Protes-

tan dan Katolik di Irlandia Utara. Kelompok keagamaan kelompok etnis dan kelompok politik sering berhasil mengatasi berbagai hambatan karena konflik menjalankan fungsi positif dalam memperkuat identitas *in-group*.

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistik dan yang tidak realistik (Poloma, 1994: 111 – 114). Konflik yang realistik “berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan”. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen merupakan contoh dari konflik realistik, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya.

Sedangkan konflik yang tidak realistik adalah “konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak”. Seperti contoh dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam lewat ilmu gaib sering merupakan bentuk konflik non-realistik: sebagaimana halnya dengan *pengkambinghitaman* yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju. Dalam hubungan-hubungan antar kelompok, *pengkambinghitaman* digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang tidak melepaskan prasangka (*prejudice*) mereka melawan kelompok yang benar-benar merupakan lawan dan dengan demikian menggunakan kelompok pengganti sebagai objek prasangka.

Coser pun menegaskan bahwasannya konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedang tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang cenderung untuk dilupakan kelak akan menciptakan suasana yang benar-benar kacau. Dan menurutnya konflik juga memi-

liki muatan positif fungsional, sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur (Poloma, 1994: 115 – 117). Dimana konflik secara positif dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok yang memantapkan keutuhan dan keseimbangan, dia menjelaskan dari hasil pengamatan terhadap masyarakat dimana ternyata terdapat adanya hubungan antara peningkatan konflik dalam kelompok dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena homogenitas mungkin penting bagi kelangsungan suatu kelompok terisolir yang berarti konflik internal tidak ada dan hal ini juga dapat berarti lemahnya interaksi kelompok tersebut dengan masyarakat secara keseluruhan. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional ini menurutnya adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus dijadikan sebagai subjek di dalam konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang nilai inti. Coser memakai contoh keluarga, bilamana seseorang melangsungkan perkawinan yang dikarenakan ingin menjadi orang tua, sedangkan pasangannya menginginkan tetap tidak punya anak, maka konflik tentang punya atau tidak punya anak ini menyangkut perjanjian persetujuan mengenai tujuan hubungan itu sendiri.

Dengan demikian jelas bahwa konflik pada pendekatan ini cenderung merusak dan memecah belah tetapi tetap terkait dan memiliki kohesi guna penciptaan keseimbangan kekuatan dan sekaligus dijadikan sebagai sarana bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan kondisi pada masyarakat. Pembahasan akan pendekatan tentang hubungan antara konflik dengan struktur sosial dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pendekatan konflik cenderung dis-fungsional bagi struktur sosial dan tidak ada atau tidak terdapatnya toleransi dan

institusionalisasi terhadap konflik. Intensitas konflik yang mengancam nantinya akan mengakibatkan terjadinya suatu penghancuran dan menyerang dasar-dasar kesepakatan sistem sosial yang berhubungan dengan kekakuan atas struktur. Ancaman bagi berlangsungnya kondisi keseimbangan terhadap struktur bukanlah dikarenakan semata-mata dengan hadirnya konflik itu sendiri, melainkan kekakuan yang membiarkan rasa permusuhan terakumulasi dan bila meledak dalam konflik cenderung disalurkan melalui satu jalur utama : perpecahan. (Poloma, 1994: 121-122)

Pada dasarnya penekanan dan penggambaran atas pendekatan konflik yang diajukan oleh Coser sebagai fungsionalisme konflik (*conflict functionalism*) yang tanpa melepaskan konsep-konsep serta asumsi-asumsi fungsionalisme strukturalnya dengan menambahkan konflik yang dinamis, perspektif integrasi dan perspektif konflik bukan merupakan skema penjelasan yang saling bersaing. Melainkan justru dengan adanya konflik, konsensus, integrasi dan perpecahan merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam menjalankan suatu proses yang fundamental, walaupun porsi setiap bagian memiliki muatan yang berbeda merupakan bagian kesatuan dari setiap sistem sosial yang berkorelasi.

### C. Suatu Usul Bagi Penjelasan Struktur Sosial (R. Dahrendorf)

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori ini merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Ia pun menganggap masyarakat bersisi ganda memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian posisi ini disempurnakan menjadi segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dan dapat pula dianalisa dengan teori konflik). Percepatan waktu dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat pada abad kesembilan belas yang mana pada masyarakat

industri kecenderungannya mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu antara lain: (1) dekomposisi modal, (2) dekomposisi tenaga kerja (3) timbulnya kelas menengah baru. (Poloma, 1994: 130- 145)

Pemilikan dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama. Kaum industrialis atau borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja atau proletar demi kelangsungan hidupnya tergantung pada sistem ini. Pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi mengakibatkan adanya korporasi-korporasi dengan saham-saham yang dimiliki oleh banyak orang dimana tak seorang pun memiliki kontrol yang eksklusif dan berperan sebagai dekomposisi modal. Penspesialisasian seperti memungkinkan sekali seseorang atau beberapa orang untuk memiliki perusahaan tetapi tidak mengendalikannya hal ini dikarenakan tuntutan zaman yang mengharuskan memiliki keahlian dan tenaga kerja spesialisasi. Yang akhirnya manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai sebagaimana halnya dengan pekerja-pekerja pabrik. Para buruh maupun pegawai kantor dapat memiliki saham perusahaan yang menjadikan mereka sebagai pemilik-pemilik bagian. Menurut Dahrendorf dekomposisi modal ini melahirkan kesulitan untuk mengidentifikasi kaum borjuis yang memiliki monopoli eksklusif atas modal maupun pengendali perusahaan, pemilikan dan pengendalian tersebut mengalami apa yang disebut diversifikasi dan tidak lagi berada dalam tangan satu individu atau keluarga saja.

Kondisi demikian terus berjalan secara berkesinambungan, dan bukan hanya sisi modal saja melainkan juga dekomposisi tenaga kerja. Kaum proletar tidak lagi sebagai suatu kelompok homogen yang tunggal, dimana para buruh terampil berada di jenjang atas sedangkan buruh biasa berada di bawah. Kaum proletar bukan lagi sebagai

massa yang tanpa perbedaan sebagaimana halnya yang terjadi pada kaum borjuis, tukang kayu, tukang pipa serta pengemudi truk memperoleh gaji jauh lebih tinggi daripada pelayan, operator dan sebagainya.

Hal seperti ini akan berdampak pada buruh yang mana nantinya akan menjurus kepada pembekakan jumlah kelas menengah dan memperkuat terjadinya suatu revolusi kelas (Poloma, 1994: 132 – 133). Dimana pada saat revolusi tiba sebagian besar kelompok kecil ini akan bergabung bersama kaum proletar untuk melawan kaum borjuis yang sekaligus terciptanya serikat-serikat buruh yang diikuti oleh mobilitas sosial yang cukup tinggi dari para pekerja. Mobilitas sosial inilah yang nantinya akan merintangai gejolak revolusi yang terjadi dalam kapitalis modern. Selain itu Dahrendorf menyatakan bawasannya ada dasar baru bagi pembentukan kelas yaitu adanya hubungan-hubungan kekuasaan (*authority*) yang menyangkut bawahan dan atasan, adanya pendikotomian antara mereka yang berkuasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain beberapa orang turut serta dalam struktur kekuasaan yang ada dalam kelompok. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua sistem kelas sosial yaitu : mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan. Perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan pada kekuasaan dari pada pemilikan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern pemilik sarana produksi tidak sepenting mereka yang melaksanakan pengendalian atas sarana itu.

Secara ringkas penggunaan teori konflik yang dilontarkan oleh Ralf Dahrendorf adalah perjuangan kelas yang terdapat di dalam masyarakat industri, yang mana tidak menekankan pada pemilikan atas sarana-sarana produksi melainkan lebih merupakan pemilikan kekuasaan, yang men-

cakup hak absah untuk menguasai orang lain. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern baik dalam perekonomian kapitalis maupun komunis, dalam pemerintahan bebas dan totaliter, berada di seputar pengendalian kekuasaan.

#### D. Konflik Dalam Masyarakat industri

Terlepas dari pendekatan-pendekatan di atas pada hakekatnya semenjak penciptaan hingga perkembangannya manusia cenderung membuat sejarah, tetapi kita tidak pernah bertindak dalam kevakuman, sejarah yang kita buat selalu terjadi dalam suasana interaksi sosial dengan orang lain. Secara hakiki manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu mekanisme pergerakan atas perubahan diawali dari kondisi ini. Pencatatan sepanjang sejarah manusia membuat penciptaan terhadap ciri dan sifat manusia yang selalu menemui konflik (Lauer, 1993: 277-308). Mitology Yunani misalnya pengenalan akan Ares (Dewa Perang) yang dibenci oleh dewa-dewa lain karena sifatnya yang kejam dan gemar bertengkar dan berperang. Berbeda dengan agama besar lainnya di dunia, berperang menurut ajaran agama Budha adalah berperang di dalam diri individu dan menentang hawa nafsu.

Di kalangan orang Babilonia, konflik adalah abadi dan merupakan perjuangan kosmik. Dewa Marduk setiap tahun berperang menentang kekuasaan, kekacauan yang diwakili oleh Dewi Tiamat yang mana perang ini merupakan perang berkepanjangan yang terjadi sebelum dunia tercipta. Adapun konflik-konflik yang terjadi pada tingkat kekuasaan, struktur birokrasi dan strata sosial di dalam masyarakat merupakan perkembangan manusia dalam pengembangan nilai kreatifitas dan inovasinya, dan hubungan antar dua segmen ini sangat erat. Hal tersebut yang nantinya akan menyebabkan perubahan pada struktur (perubahan pada nilai-nilai atau pranata). Seperti yang dikatakan oleh Dahrendoft seorang

sosiolog Amerika, seluruh inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakatnya disebabkan konflik antar kelompok, individu dan antara emosi dengan emosi dalam diri sendiri (Lauer, 1993: 281-282).

Perkembangan ilmu pengetahuan menurut jamannya sedikit banyak ikut andil dalam perwujudan perkembangan manusia dan dunia secara global. Pengetahuan atas proses perkembangannya yang diawali dengan gesekan-gesekan antar individu ini (konflik) berimplikasi terhadap pembentukan pola perilaku sosial individu di dalam lingkungan masyarakatnya, dan kompetisi serta persainganlah yang menuntun ke arah perubahan. Adapun bentuk perubahan itu dapat berupa peradaban, kebudayaan, masyarakat, komunitas, institusi, organisasi, interaksi, dan individu. Perubahan-perubahan yang disebabkan adanya kompetisi dan persaingan itu merupakan faktor kreativitas dan inovasi dengan pengertian manusia sebagai individu selalu mengidentifikasi kompetisi sebagai pendorong yang kuat, ganjaran-ganjaran yang dihadapi di dalam hidupnya mengharuskan individu untuk mendasari pelaksanaan pada bentuk pekerjaan (Lauer, 1993: 284).

Perebutan-perebutan lahan pekerjaan itu dapat dijadikan sebagai contoh bahwasannya manusia ingin berkompetisi untuk saling mengalahkan dan mendapatkan bagian yang maksimal dari ganjaran-ganjaran kebersamaan mereka. Dengan kata lain konflik antar kelompok dapat terlihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada. Jika pendekatan di atas diturunkan pada tingkat kemasyarakatan dalam hal ini lingkungan masyarakat buruh sebagai hasil dari sebuah organisasi industri, dimana perusahaan industri adalah sebuah kelompok kekuatan atau *imperatively coordinated group* yang mana perusahaan ini memiliki hirarki kekuasaan yang ditandai dengan buruh di bawah (tingkat kekuasaan

terendah) dan beberapa tingkat pimpinan (manajemen) di atasnya. Kekuasaan manajemen adalah sah dan dipertahankan melalui berbagai sanksi (penurunan pangkat, pemecatan dan sebagainya). Oleh karena itu terdapat konflik kepentingan yang melekat antara manajer dan buruh. Dengan adanya perbedaan muatan kepentingan antara kedua kelompok tersebut yakni kelompok kepentingan majikan dan kelompok kepentingan buruh mengakibatkan terbentuknya mekanisme konflik yang secara kondusif akan menghasilkan perubahan secara struktural dalam organisasi industri dan dalam posisi relatif di lingkungan masyarakat buruh. Kondisi demikian merupakan perwujudan dari pergesekan yang sifatnya vertikal dimana kepentingan kelompok majikan dalam menentukan sistem kebijaksanaan, nilai upah dan pembagian jam kerja. Selain itu gesekan-gesekan yang sifatnya vertikal ini selalu mengesampingkan kekuatan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan di organisasi industri itu. Dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara kekuasaan kepentingan konflik itu sendiri dengan kekuasaan. Dengan kata lain kekuatan kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham misalnya menentukan di dalam penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan di organisasi industri tersebut atau pabrik.

Pengesampingan-pengesampingan yang terjadi pada tingkat pemegang kekuatan kekuasaan itu akhirnya berimbas pada lapisan yang ada di tingkat bawah. Dimana kekuatan buruh pada kondisi ini sama sekali tidak terlihat atau bahkan ditutupi oleh adanya muatan nilai produksi yang cukup tinggi. Kecenderungan akan hasil produksi yang cukup tinggi ini seakan-akan menjadi prioritas pertama di dalam penentuan kelangsungan organisasi industri. Kondisi yang tidak kondusif sekaligus perlakuan yang condong pada pengeksploitasian ini tanpa disadari akan menciptakan perubahan secara revolusioner di tataran masyarakat

buruh. Pembentukan hubungan kolektivitas dan penyeragaman pola perilaku serta penciptaan kompetitif di lingkungan kerja merembes ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tanpa adanya pengolahan yang sifatnya akademik. Dengan demikian perbedaan-perbedaan yang dimiliki dan terpendam oleh hasil kekuasaan terkadang terlampiaskan untuk memenuhi hasrat yang terkekang. Di dalam pemenuhan hidupnya selalu mengimpikan kelayakkan seperti yang lain dan serasa terlepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Pemenuhan akan tingkat produksi dan jasa-jasa atas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak pabrik kerap kali tidak selalu diimbangi oleh pemenuhan akan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan sebagai bentuk lain yang harus dimiliki oleh para pekerja pabrik (buruh) Pemenuhan akan kebutuhan merupakan kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap orang, pencerminan pemikiran atas hak dan kewajiban seseorang harusnya dapat terlihat ketika tugas yang dilakukan oleh pekerja sudah terpenuhi seharusnya pulalah diimbangi oleh imbalan atas tugas itu yang mana merupakan bentuk atas hak segenap pekerja. Terlepas dari itu semua, pada hakikatnya di dalam setiap menjalankan proses produksi terdapat tiga faktor yang tidak dapat diabaikan, yaitu alam, modal dan tenaga kerja. Ketiga faktor ini dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil produksi dan jasa-jasa, sekaligus mendapat perhatian atau imbalan yang seimbang yang dengan sumbangan yang diberikannya. Kita berhak mengolah segala bentuk sumber-sumber alam, namun kita juga berkewajiban pula untuk memelihara kelestariannya. Janganlah menebang hutan dengan semena-mena karena akan menimbulkan erosi atau pengotoran udara yang akan menimbulkan krisis ekologi dan mengganggu keseimbangan alam itu sendiri.

Demikian pula halnya dengan tenaga kerja manusia itu sejak lahir berhak menikmati hasil-hasil produksi. Seperti makanan,

pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Setelah ia mencapai usia tertentu manusia itu wajib bekerja (Trimurti, 1976). Sesuai dengan martabat kemanusiannya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, "setiap warganegara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak..." Kalau kita mau konsekwen ingin melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 itu, maka tenaga kerja dan/atau buruh itu berhak pula menerima imbalan dari sumbangannya dalam proses produksi dalam bentuk upah, jaminan sosial, jaminan hari tua dan perlindungan waktu melaksanakan pekerjaan. Umpamanya, pengusaha hutan seharusnya menyampaikan keterangan tentang, hilangnya seorang buruh di tengah hutan belantara atau buruh yang mati tertimpa runtuh waktu pembangunan gedung-gedung. Dalam hal ini pengusaha wajib memberikan uang atau apapun namanya kepada keluarga yang tertimpa musibah itu. Terhadap buruh wanita, penguasa atau majikan wajib menjaganya agar pengusaha atau majikan wajib menjaganya agar dalam bekerja fungsi biologisnya sebagai wanita tidak terganggu.

Pemenuhan akan tingkat hidup yang terkadang tidak terpenuhi oleh penghasilannya sebagai buruh pabrik dan adanya perbedaan penghasilan antar sesama pekerja buruh pabrik yang diluar perkiraan dikarenakan adanya perbedaan latar pendidikan dan penguasaan ketrampilan dapat mengakibatkan kondisi kekerasan di lingkungan masyarakat (adanya gesekan-gesekan yang sifatnya horizontal), seperti pencurian, intrik-intrik sosial yang kecenderungannya selalu melihat persaingan dalam bentuk material yang akhirnya berkelanjutan menjadi sentimental sosial.

#### **E. Penutup : Hubungan Kekuasaan Menyebabkan Perubahan Struktural**

Pada akhirnya dengan adanya konflik kelas (konflik mengenai hubungan kekuasaan atau yang muncul di luar hubungan kekuasaan) menyebabkan adanya peruba-

han secara struktural (perubahan nilai atau aturan sosial pada masyarakat). Pergesekan-pergesekan seperti ini merembes akibat dari adanya hubungan kekuasaan. Pada masyarakat buruhpun demikian, dimana hasil dari kekuatan industri membuat corak pada lingkungan masyarakat identik dengan kekerasan. Akibat dari adanya kekuatan kekuasaan yang menimbulkan konflik baik yang vertikal atau horisontal. Dan keadaan demikian didukung oleh pernyataan Dahrendorf, yakni:

1. Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan, dan perubahan itu dapat terjadi dimana saja.
2. Setiap masyarakat dalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik, dan konflik sosial ada dimana saja.
3. Setiap unsur dalam satu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya.
4. Setiap masyarakat berdasarkan atas penggunaan kekerasan oleh sebagian anggotanya terhadap anggota lain. (Lauer, 1993: 281-282; Poloma, 1994: 115-117)

Namun tanpa disadari bawasannya penciptaan perubahan yang ada juga seiring dengan perubahan yang ada di dalam struktur masyarakat itu sendiri. Sama halnya dengan kondisi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan akan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan sumber daya manusia seutuhnya. Hal inilah yang terabaikan dalam proses industrialisasi yang bercorak developmentalis. Dimana pembangunan di sentra-sentra industri yang memunculkan pabrik-pabrik sebagai tempat lapangan kerja bagi para pekerja (buruh) juga menimbulkan perubahan kebudayaan di dalam masyarakatnya, peralihan mata pencarian, pandangan hidup serta pola perilaku yang tercipta di dalam hubungan masyarakat sekitarnya (buruh) secara progresif dan revolusioner ikut mengalami perubah-

an seperti ucapan yang dilontarkan oleh Marx bahwasannya revolusi adalah penting. Baik untuk menghancurkan tatanan sosial yang ada yang tidak rasional maupun untuk membersihkan mereka yang telah ditindas oleh tatanan yang ada itu (Lauer, 1993: 294-297). Kekerasan mungkin menjijikkan bagi orang yang hidup enak dan makmur, tetapi bagi orang yang tertindas, kekerasan merupakan palu untuk menghancurkan rantai yang membelenggu mereka. Kekerasan yang terjadi ini seperti halnya yang terjadi pada komunitas masyarakat buruh, dimana kekerasan yang mereka dapat di dalam kehidupannya yang dirasakan selalu saja tidak pernah lepas dari kungkungan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemilik modal (boss), kerap kali kekerasan secara fisik di dunia pekerjaannya sebagai buruh selalu saja dirasakan seperti misalnya; pelecehan seksual, perkataan (cacian kasar) dan bahkan cacian yang sifatnya penekanan secara psikologis. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan sebagai pekerja buruh dan selalu tidak bisa dihindari seakan-akan selalu melekat di dalam hidup dan pandangan matanya.

Kekerasan terjadi bila antar setiap manusia melakukan hegemoni terhadap orang lain, proses hegemoni dalam bentuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya dalam bentuk demikian rupa. Sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Windhu, 1992: 111-112). Realisasi potensial adalah apa yang memang mungkin direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jaman-nya. Penyalahgunaan sumber-sumber daya dan hasil-hasil perkembangan atau pembangunan untuk tujuan lain atau "dimonopoli" oleh segelintir orang atau kelompok saja, maka terjadi kekerasan dalam suatu sistem. Membiarkan penderitaan penyakit atau bencana yang diderita sebagian besar rakyat bawah, padahal sebenarnya bisa diatasi.

Kondisi kekerasan yang nampak inilah yang secara implisit dapat diuraikan bahwa sebenarnya kekerasan merupakan suatu bentuk yang memiliki kekuatan dan adanya unsur paksaan dan tekanan. Dengan demikian, akhirnya dapat diklasifikasikan beberapa dimensi mengenai kekerasan, antara lain :

1. Kekerasan fisik dan psikologis

Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Di sini jelas bahwa kemampuan somatis seseorang yang mengalami kondisi ini otomatis berkurang atau hilang sama sekali. Sarana transportasi yang tidak merata, yang terakumulasi pada orang-orang atau tempat tertentu dan memperjelas adanya mobilitas dan mengurangi aktualisasi potensi jasmani. Demikian juga memencarakan atau merantai. Sekaligus mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang. Sama halnya dengan kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksudkan meredusir kemampuan mental atau otak atau dengan kata lain adanya kerusakan pada *hurt* dan *hit*.

2. Pengaruh positif dan negatif

Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan melakukan hukuman, tetapi juga dengan memberi imbalan (*reward oriented*). Yang mana dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas kurang terbuka dan cenderung manipulatif. Meskipun demikian selalu memberikan kenikmatan dan *euphoria*.

3. Ada objek atau tidak

Kekerasan dapat terlihat secara gamblang dan jelas jika memang memiliki tempat untuk mengaktualisasikannya. Bila tidak memiliki objek fisis atau biologis tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan. Proses kekerasan yang berlangsung selalu menimbulkan efek ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

4. Ada subjek atau tidak

Kekerasan dapat terlihat secara jelas pula jika ada person yang melakukan tindakan atas kekerasan tertentu. Suatu kekerasan dapat disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung (Lubis, 1988: 45-51). Disini jelas perbedaannya bahwa dampak atau akibat dari kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit). Namun kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Dan jika terdapat kondisi demikian, maka kekerasan sudah merupakan bagian dari struktur (strukturnya jelek). Kondisi yang demikian (struktur yang jelek) menciptakan situasi-situasi yang negatif. antara lain seperti adanya ketimpangan atas sumberdaya, pendapatan, kepandaian, pendidikan, serta wewenang untuk mengambil keputusan.

5. Disengaja atau tidak

Perbedaan penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai "kesalahan" yang dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan. Menurut pendefinisian Galtung ingin mengungkap berbagai kemencengan atas pemahaman mengenai kekerasan, perdamaian serta sistem etika yang dimaksudkan untuk memerangi kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja ini tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja dengan halus dan tidak disengaja. Bila tindakan itu diarahkan untuk perdamaian maka terlalu sedikit yang dapat dijangkau. Maka dari itu Galtung memberikan perspektif yang agak luas dengan melibatkan unsur ketidaksengajaan, serta yang menyangkut nasib banyak orang. Jadi dengan demikian tindakan yang diarahkan untuk perdamaian berarti

diarahkan untuk menentang kekerasan secara langsung dan tidak langsung (struktural). Karena, dilihat dari sudut korban, sengaja atau tidak kekerasan itu tetap kekerasan.

6. Yang nampak dan tersembunyi

Kekerasan yang nampak atau nyata (manifest), baik yang sifatnya personal maupun structural, dapat terlihat secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (laten), tetapi bisa dengan mudah meledak. (Windhu, 1992: 67-72)

Dengan demikian kondisi kekerasan yang sekaligus menjadikan reaksi atas perubahan secara berangsur-angsur dapat terus bergulir dan tanpa sadar telah menciptakan proses eksploitasi, marginalisasi, ketimpangan dan ketidakadilan terhadap kaum yang ditindas (kaum buruh). Pergolakan-pergolakan yang tercipta memang merupakan pencerminan atas kondisi alam yang demokratis. Penyelewengan-penyelewengan atas hak manusia tersebut memang menghadirkan peta konflik antara buruh (tingkat kekuasaan terendah) dengan kelompok pemilik kekuasaan seperti pemerintah, pemilik saham/modal di dalam sebuah organisasi industri, yang pada akhirnya menciptakan adanya gerakan-gerakan sosial sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan atas tuntutan demokratisasi (Budiman, 1996: 81-91).

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk yang bebas, memiliki akal budi dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Tetapi dengan kehadirannya pula manusia ditindas oleh kekuasaan yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Dimana penciptaan sistem yang kapitalistik di dalam organisasi industri itu justru menindas dan menjadikan manusia sebagai bahan untuk melakukan kompetitif terhadap manusia lainnya. Hal ini merupakan pencerminan dari adanya

kehadiran pembangunan yang mana di dalam perwujudannya tidak terlepas dengan kehadiran teknologi guna pencapaian percepatan dari hasil yang akan dimuat dalam bentuk nilai-nilai ekonomis (Capra, 1997: 321-324). Padahal perkembangan pembangunan bukan hanya melibatkan pertumbuhan dan ekonomis belaka. Tetapi tidak terlepas dengan pertimbangan segi-segi sosial, politik dan nilai-nilai kebudayaan yang merangkul menjadi satu dan membentuk kristal integritas nasional. Adapun dalam pencapaian proses integrasi itu sendiri perlu dilakukan suatu perencanaan atau strategi guna mencapai perubahan sosial secara global (*The International Development Strategi*) (Sachs, 1995: 17-24).

Perencanaan strategi itu harus didasarkan pada kegiatan/aksi yang terpusat di dalam semua wilayah ekonomi dan kehidupan sosial. Strategi-strategi itu berwujud komponen-komponen ekonomi dan sosial di dalam perancangan pola pembangunan, antara lain :

1. Tidak satupun kependudukan berada di luar dari lingkup perubahan dan pembangunan
2. Mengakibatkan perubahan struktural yang demi kepentingan nasional dan mengaktifkan semua sektor penduduk untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan.
3. Menuju ke persamaan sosial, termasuk pencapaian pembagian pendapatan dan kesejahteraan yang merata di dalam suatu bangsa.
4. Memberikan prioritas tinggi kepada pembangunan potensi manusia dan penyediaan peluang kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan. (Sachs, 1995: 19-21)

Oleh karena itu tidak mengherankan jika kondisi yang ditemukan di lapangan cenderung terlihat terjadinya kemajuan pembangunan yang diiringi oleh pertumbuhan yang cukup tinggi, dan seringkali harus dibayar dengan memarjinalkan lapisan masyarakat bawah dalam hal ini buruh baik dalam peran politiknya maupun hak-hak sosial ekonominya. Persoalan ini sudah menjadi problematika pada negara-negara Dunia Ketiga. Disamping itu pula pengkritisan yang terjadi dalam bentuk suatu pergerakan yang dilakukan oleh kaum buruh untuk berjuang demi peningkatan kesejahteraan sering ditanggapi oleh pengusaha sebagai suatu gerakan mengganggu pembangunan dan stabilitas dan sebab itu harus dihindari dengan cara-cara yang terkadang kurang sesuai dengan etika, moral dan hukum yang berlaku, bahkan terkesan represif. Kondisi yang demikian yang juga memicu semakin progresnya perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh, dimana penyikapan yang diterapkan terkadang juga bersindrom akan kekerasan. Disinilah posisi kita sebagai kaum intelektual harus dapat memberikan pandangan dan menjembatani untuk menuju pemikiran yang jernih dan objektif.

Posisi yang tercipta di dalam lingkungan masyarakat itu saling bergesekan erat dan tidak pernah akan berkorelasi, dikarenakan pihak pengguna kepentingan dalam hal ini pemegang kekuasaan dan pemilik modal tidak menempatkan posisinya secara benar, serta penggunaan wewenang yang berlebihan dan kekuatan kekuasaan yang dominan ini.

## Daftar Pustaka

- Budiman, Arif. *Dimensi Kritik Proses Pembangunan Di Indonesia, Gerakan Sosial, Demokrasi Di Indonesia*. Kanisius. Yogyakarta. 1996.
- Cakra, Fritjof *Titik Balik Peradaban, Sisi Gelap Pertumbuhan*, Yayasan Bentang Budaya, Jakarta. 1997.
- Lauer, Robert H. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Renika Cipta. Jakarta. 1993.
- Lubis, Mochtar. *Menggapai dunia damai*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sachs, Wolfgang. *Kritik atas pembangunanisme. Telaah Pengetahuan Sebagai Alat Penguasaan, Inflasi Konseptual Pembangunan di Dunia Ketiga*. CPSM 1995.
- Trimurti, S.K. *Hak dan kewajiban kaum buruh harus seimbang*, Prisma No.9 September 1976 Tahun V, LP3ES.
- Windhu, I Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut J Galtung*. Kanisius, Yogyakarta, 1992.